

Analisis Tingkat Kemiskinan Kaum Urban Berdasarkan Indeks Cibest di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo

Nur Imam Saifuloh

Program Studi Ekonomi Islam, IAIN Purwokerto

seihamoza@gmail.com

Abstrak: Ketidakadilan sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia membawa dampak pada semakin tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan. Keadaan ini pada gilirannya membuat masyarakat pedesaan banyak berpindah ke kota atau lazim disebut dengan istilah urbanisasi. Dengan menggunakan Indeks CIBEST, penelitian ini bermaksud mengungkapkan bagaimana gambaran kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Kepil dan menganalisis apakah terdapat perbedaan kemiskinan antar desa berdasarkan tingkat urbanisasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Indeks CIBEST dan *software* SPSS dengan fungsi *Cross-Tabulation*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan kaum urban di Kecamatan Kepil didominasi oleh keluarga dalam kuadran kedua (kemiskinan materi) yakni sejumlah 112 keluarga (91,1%). Sedangkan 11 keluarga lainnya (8,9%) termasuk dalam kategori kuadran pertama atau sejahtera. Nilai Indeks CIBEST kuadran 1 (*Welfare/ W*) berkisar pada 0,089 dan kuadran 2 (*Material Poverty/ MP*) berkisar pada 0,91. Selain itu, tidak terdapat perbedaan kemiskinan antar desa berdasarkan tingkat urbanisasinya. Hal ini diketahui dari nilai *Asymptotic Significance* yang lebih besar dari pada nilai probabilitasnya ($0,055 > 0,05$).

Kata Kunci: urbanisasi; Kemiskinan; Indeks CIBEST; Kecamatan Kepil

Abstract: Inequality of economy system in Indonesia impacts to the poverty in rural area is high. This condition makes people in rural move to urban as called as urbanization. By using CIBEST Index, this study aim to describe the poverty in Kepil District and analyze is there a differences among village based on urbanization rate. Type of study had been used in this research is quantitative descriptive by study case approach. Questionare, interview and documentation are instrument research that used

to collect data. And to analyze it, use CIBEST Index and SPSS software with function of Cross-Tabulation. The result of this study describe the urban poverty in Kepil District dominated by population in second quadrant, it is 112 family (91,1%) of total population. While the other family is in prosperous condition (first quadrant), it only 11 family (8,9%). Value of Welfare (W) on CIBEST Index is 0,089 and the Material Poverty (MP) as the second quadrant is 0,91. There is not difference among the village based on urbanization rate. It known from Asymptotic Significance value is bigger than probability value ($0,055 > 0,05$).

Key Word: urbanization; Poverty; CIBEST Index; Kepil Subdistrict

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan utama yang tengah dihadapi negara-negara di dunia baik negara maju ataupun negara berkembang adalah kemiskinan. Pembahasan mengenai kemiskinan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi. Suharto menyebutkan paling tidak ada empat faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual di mana seseorang menjadi miskin karena pribadinya. Kedua, faktor sosial di mana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural di mana seseorang menjadi miskin karena budaya negatif yang ada dalam masyarakat atau lingkungannya. Keempat, faktor struktural di mana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi.¹

Pembangunan ekonomi memusat, kontrasnya kehidupan pedesaan dan perkotaan, kesenjangan ekonomi antara *the have* dan *the have not*, dan distribusi pendapatan yang tidak merata adalah realita ketidakadilan sistem ekonomi saat ini. Keadaan ini memicu masyarakat khususnya yang berada di pedesaan untuk pindah ke kota guna mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Pada mulanya hal ini berdampak positif karena kebutuhan akan tenaga kerja di perkotaan terpenuhi dengan baik. Seiring berjalannya waktu, arus urbanisasi semakin deras dan tidak terkontrol sehingga berdampak pada polemik di perkotaan yang kian kompleks. Pada saat yang sama juga muncul kekhawatiran di pedesaan yang mana kehilangan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi.

¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016, h. 70.

Beberapa pemaparan berikut menunjukkan bahwa urbanisasi yang terjadi di Indonesia dinilai sangat memperihatinkan. Data *Price Waterhouse Cooper* pada 2014 menyatakan bahwa tingkat populasi urbanisasi Indonesia mencapai 51,4% merupakan tertinggi kedua di antara negara-negara ASEAN.² Pada 2015, data *World Bank* menyebutkan sebesar 53,7% total penduduk Indonesia atau sekitar 138.419.945 orang adalah kaum urban. Angka ini bertambah hampir dua kali lipat jika dibandingkan 20 tahun lalu yang hanya 71.054.512 penduduk.³ Derasnya arus urbanisasi ini juga tidak berdampak pada meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) nasional secara signifikan. Pertumbuhan 1% urbanisasi hanya mampu menaikkan 4% PDB per kapita.⁴ Akhirnya, kesejahteraan yang selama ini diharapkan oleh kaum urban masih belum dapat dirasakan sepenuhnya.

Namun, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya perbaikan dari sisi ekonomi bagi masyarakat urban. Angka kemiskinan baik di perkotaan atau pedesaan perlahan mengalami penurunan. Berikut tabel yang menggambarkan data kemiskinan pada kedua wilayah tersebut:

Tabel 1
Kemiskinan Desa dan Kota⁵

Tahun	Garis Kemiskinan		Jumlah Penduduk		Persentase (%)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
2012	277.382	240.441	10,51	18,09	8,60	14,70
2013	308.826	275.779	10,63	17,92	8,52	14,42
2014	326.853	296.681	10,36	17,37	8,16	13,76
2015	356.378	333.034	10,62	17,89	8,22	14,09
2016	372.114	350.420	10,49	17,28	7,73	13,96

Bila melihat data pada tabel di atas, Garis Kemiskinan (GK) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Konsep GK yang dikeluarkan BPS ini dibangun atas dua pondasi utama yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Sebagaimana diketahui bahwa harga-harga kebutuhan pokok baik makanan atau

² Husen Miftahudin, *Urbanisasi di Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN*, www.metrotvnews.com diakses pada 5 Oktober 2017.

³ *Tua di Jalan: Warga Jabodetabek Habiskan 3,63 Juta Jam Per Hari*, <http://www.tribunnews.com> diakses pada 4 Oktober 2017.

⁴ Ridwan Aji Pitoko, *Di Indonesia, 1 Persen Urbanisasi Sama Dengan Pertumbuhan 4 Persen PDB*, Jakarta: www.properti.kompas.com diakses pada 5 Oktober 2017.

⁵ BPS, *Statistik Indonesia 2017*

bukan makanan setiap tahun selalu meningkat. Oleh karena itu, GK nilainya pun selalu meningkat bersamaan dengan peningkatan kebutuhan pokok. Kendati memiliki GK lebih rendah dari pada perkotaan dan angka kemiskinan mengalami tren penurunan, namun secara data jumlah penduduk desa yang tergolong miskin lebih banyak dari pada penduduk kota.⁶

Selain data di atas, adanya perbaikan dari sisi ekonomi bagi masyarakat urban juga diperkuat dari data presentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut kelompok kategori lapangan usaha selama 2013-2015 menunjukkan adanya peningkatan.⁷ Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan selama 2013-2015 menunjukkan penurunan secara berkala.⁸ Dari data ini apakah kemudian dapat disimpulkan bahwa penyebab menurunnya angka kemiskinan adalah urbanisasi? Lantas, apakah anggapan bahwa tingkat urbanisasi tinggi akan menyebabkan kemiskinan menjadi berkurang dapat dikatakan benar? Inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian mendalam.

Sebuah fakta menarik digunakan untuk menjawab permasalahan di atas. Bahwasannya Kabupaten Wonosobo adalah salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir. Angka kemiskinannya tercatat sebesar 22,08% dan berada pada zona merah yang memerlukan perhatian khusus. Dari total penduduk sebanyak 773.280 jiwa, sebanyak 7.080 penduduk adalah total buruh migran yang bekerja baik di dalam ataupun luar negaeri. Angka tersebut merupakan komposisi dari 2.770 buruh migran laki-laki dan 4.310 buruh migran perempuan. Adapun data yang menunjukkan urbanisasi total penduduk Kabupaten Wonosobo tercatat sebanyak 1.321 penduduk. Lebih mendalam lagi, salah satu kecamatan yang ada di kabupaten ini yakni Kecamatan Kepil merupakan kecamatan dengan tingkat urbanisasi tertinggi yakni sebanyak 199 penduduk.⁹

⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016), h. 69.

⁷ *Data Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kelompok Kategori Lapangan Usaha Selama 2013-2015*, Badan Pusat Statistik. 2015.

⁸ *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Selama 2013-2015*, Badan Pusat Statistik. 2015.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2017*, (Wonosobo: BPS. 2017)

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna menjawab permasalahan sebagaimana disebutkan di awal. Namun, dalam penelitian ini dikehendaki menggunakan Indeks CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) yang merupakan salah satu alat ukur kemiskinan melalui pendekatan ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Irfan Syaumi Beik dan Layli Dwi Arsyianti dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dipilihnya indeks CIBEST karena alat ukur ini memasukkan unsur spiritual disamping materi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, kaum urban dan keluarganya sebagai pelaku urbanisasi, dan masyarakat pada umumnya baik dari kalangan akademisi maupun non akademisi agar pembangunan ekonomi di Indonesia dan daerah pada khususnya bisa lebih terarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif-deskriptif. Analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁰ Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang merupakan kecamatan dengan tingkat urbanisasi tertinggi.

Populasi penelitian ini adalah semua penduduk Kecamatan Kepil yang terdaftar dalam Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (TKI AKAD) yang berjumlah 199 penduduk.¹¹ Pengambilan data ini didasarkan pada pengertian TKI AKAD menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/ MEN/ IV/ 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yang berarti penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.¹² Jumlah populasinya 199 orang. Dalam penelitian ini dikehendaki taraf kesalahan sebesar 5%. Atas dasar itu maka menurut Tabel Issac dan Michael, dari jumlah populasi 199 penduduk dihasilkan sampel sejumlah 123 responden.

Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini; (1) variabel independen yakni kemiskinan yang digambarkan dalam empat kuadran dan (2)

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 14.

¹¹ Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2016, *Jumlah Pencari Kerja Menurut Lokasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2015*. (Wonosobo: Badan Pusat Statistik, 2016), h. 71.

¹² Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/ MEN/ IV/ 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

variabel dependen yakni tingkat urbanisasi yang dibagi menjadi tiga kelas interval yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berikut ini dipaparkan mengenai data penduduk yang melakukan urbanisasi beserta sampel yang diambil dalam penelitian ini:

Tabel 2
Data Penduduk Urbanisasi dan Sampel Responden¹³

No.	DESA	Populasi Kaum Urban	Hasil Perhitungan	Sampel (Pembulatan)
1	Gadingsukuh	6	3,708543	4
2	Burat	7	4,326633	4
3	Gadingrejo	20	12,36181	12
4	Bener	10	6,180905	6
5	Tegeswetan	8	4,944724	5
6	Gondorwulan	13	8,035176	8
7	Jangkrikan	9	5,562814	6
8	Kepil	18	11,12563	11
9	Kapulogo	7	4,326633	4
10	Kagungan	6	3,708543	4
11	Randusari	6	3,708543	4
12	Rejosari	4	2,472362	2
13	Kalipuru	3	1,854271	2
14	Ngalian	3	1,854271	2
15	Tanjunganom	9	5,562814	6
16	Kaliwuluh	10	6,180905	6
17	Beran	13	8,035176	8
18	Tegalgot	6	3,708543	4
19	Warangan	7	4,326633	4
20	Ropoh	19	11,74372	12
21	Pulosaren	15	9,271357	9
Total		199	123	123

Adapun skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial yakni urbanisasi. Dengan skala ini pula variabel yang akan diukur dapat dijabarkan menjadi indikator variabel. Sedangkan untuk pengumpulan data digunakan metode wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

¹³ Data Penduduk Urbanisasi dan Pengambilan Sampel (Data Diolah)

Selanjutnya, guna analisa lebih mendalam maka digunakan analisis Crosstabulation yang terdapat pada aplikasi software SPSS Versi 20.0.

Analisis data dilakukan selanjutnya dengan indeks CIBEST. Hal ini untuk mengetahui pembagian kuadran I, II, III, dan IV. Kuadran I merupakan indeks kesejahteraan yang diformulasikan dengan $W = w/N$, di mana W = indeks kesejahteraan, w = jumlah keluarga sejahtera (kaya secara materi dan spiritual), dan N = jumlah populasi (keluarga yang diobservasi). Untuk mengetahui apakah suatu keluarga itu berkecukupan secara materiil dan spiritual, maka besarnya kebutuhan materi dan spiritual minimal harus dihitung terlebih dahulu. Nilai W berkisar antara 0 dan 1.

Kuadran II merupakan kemiskinan materi. Standar kebutuhan materi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pakaian, makanan, rumah, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendasar. Formula kebutuhan materi minimal, $MV = \sum Mi.Pi$, di mana: MV = standar minimal kebutuhan yang harus dipenuhi (R_p atau mata uang lain), Mi = jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan, dan Pi = harga barang dan jasa.

Kuadran III adalah kemiskinan spiritual. Pada kuadran ini, kondisi yang terjadi adalah rumah tangga tergolong mampu secara materiil namun tergolong tidak mampu secara spiritual. Hal ini didasarkan pada Garis Kemiskinan Spiritual (SV) yang nilainya sama dengan 3. Kemiskinan spiritual terjadi ketika seorang/ keluarga tidak melaksanakan ibadah wajib secara rutin atau menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga atau masyarakat yang tidak perlu diatur dengan baik.

Kuadran IV merupakan kemiskinan absolut. Pada kuadran ini, keluarga atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual sekaligus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga/ rumah tangga yang masuk dalam kelompok ini adalah miskin secara materi dan miskin pula secara spiritual/ rohani. Secara ringkas, keempat kuadran diklasifikasikan melalui gambar berikut:

Gambar 1



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, Kecamatan Kepil memiliki luas wilayah 9.386,92 hektar atau 9,53% dari luas Kabupaten Wonosobo dengan komposisi tata guna lahan atas lahan sawah seluas 12,10% dan lahan bukan sawah 87,90%. Keadaan ini membuat komposisi sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani/pekebun. Adapun bagi yang tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan, profesi sebagai pedagang, wirausaha, buruh atau merantau ke daerah lain menjadi pilihan. Beberapa daerah tujuan masyarakat Kecamatan Kepil untuk melakukan urbanisasi antara lain dapat dilihat dari data hasil penyebaran angket berikut:

Tabel 3
Daerah Tujuan Urbanisasi Masyarakat Kecamatan Kepil¹⁴

No.	Daerah Tujuan Urbanisasi	Jumlah Penduduk	No.	Daerah Tujuan Urbanisasi	Jumlah Penduduk
1.	Semarang	42	8.	Bangka Belitung	3
2.	Jakarta	34	9.	Lampung	3
3.	Kalimantan	16	10.	Surabaya	2
4.	Yogyakarta	6	11.	Tasikmalaya	2
5.	Palembang	3	12.	Surakarta	2
6.	Bandung	3	13.	Purworejo	2
7.	Magelang	3	14.	Grogol	2

Daerah tujuan urbanisasi masyarakat di Kecamatan Kepil merupakan daerah kota metropolitan terutama Semarang dan Jakarta.

¹⁴ Hasil Penyebaran Kuesioner terhadap 123 Responden

Dari realita ini menunjukkan bahwa daerah metropolitan yang berbasis industri menarik lebih banyak tenaga kerja. Kekurangan faktor produksi berupa tenaga kerja di perkotaan ditopang dengan adanya penduduk pedesaan yang pindah ke kota dalam rangka mendapatkan pekerjaan (urbanisasi). Kelebihan tenaga kerja di pedesaan dan adanya daya tarik di perkotaan menyebabkan keduanya saling bersimbiosis mutualisme.

Keadaan yang menggambarkan fenomena di atas sejalan dengan Teori Migrasi dan Teori Transformasi Struktural yang dikemukakan oleh Arthur Lewis dan Hollin Chenery. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang diidentikkan dengan sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industrialnya. Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknya tinggi maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja. Tingkat hidup masyarakatnya juga berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya subsisten. Kelebihan tenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk marjinalnya nol dan tingkat upah riil yang rendah.

Nilai produk marjinal nol artinya fungsi produksi di sektor pertanian/ pedesaan telah sampai pada tingkat berlakunya *the law of diminishing return*.¹⁵ Semakin banyak orang bekerja di sektor pertanian semakin rendah tingkat produktivitas atau total produksi yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Hal ini menyebabkan tingkat upah di pedesaan rendah. Sebaliknya, sektor industri dan jasa di perkotaan mengalami kekurangan tenaga kerja. Sesuai perilaku rasional pengusaha yakni mencari keuntungan maksimal, kondisi pasar buruh seperti ini membuat produktivitas tenaga kerja sangat tinggi dan nilai produk marjinal dari tenaga kerja positif. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi produksinya belum berada pada tingkat optimal sehingga membuat tingkat upah riil per pekerja di sektor perkotaan tinggi.

Perbedaan upah di sektor pertanian dan industri menarik banyak tenaga kerja pindah dari sektor pertama ke sektor kedua sehingga terjadilah suatu proses migrasi dan urbanisasi. Tenaga kerja yang pindah ke industri secara langsung mendapat penghasilan lebih tinggi dari pada sewaktu masih bekerja di pertanian. Bersamaan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, konsumsi semakin meningkat dan ini menjadi

¹⁵ *The Law of Diminishing Returns* adalah sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika input melebihi kapasitas produksi maka returns (pendapatan) akan semakin menurun (Lihat Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 52-53).

faktor pendorong utama pertumbuhan output di sektor tersebut dari sisi permintaan agregat dan dalam jangka panjang perekonomian pedesaan mengalami pertumbuhan.¹⁶

Pada saat dilaksanakan penelitian ini, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonosobo berada pada angka 2,51% per tahun, dengan total jumlah penduduk saat ini mencapai 777.116 jiwa. Adapun penduduk yang bekerja di sektor pertanian menempati urutan pertama dengan total tenaga kerja mencapai 183.091 jiwa. Padahal tingkat pengangguran yang terjadi pada waktu itu adalah 4,47%. Keadaan ini menyebabkan banyak penduduk yang beralih ke kota untuk mendapatkan pekerjaan layak guna kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan tingkat urbanisasinya, dari 21 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kepil dapat diklasifikasikan ke dalam 3 strata tingkatan yaitu rendah (3-8 orang/ penduduk yang melakukan urbanisasi), sedang (terdapat 9-14 orang/ penduduk yang melakukan urbanisasi) dan tinggi (terdapat 15-20 penduduk berurbanisasi). Atas dasar ini, maka tingkat urbanisasi penduduk berdasarkan kelurahan/ desa di Kecamatan Kepil adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Tingkat Urbanisasi Kecamatan Kepil Berdasarkan Desa/ Kelurahan¹⁷

No.	DESA	Urban	Penentuan Tingkat Urbanisasi	Kategori
1	Gadingsukuh	6		Rendah
2	Burat	7		Rendah
3	Gadingrejo	20		Tinggi
4	Bener	10		Sedang
5	Tegeswetan	8		Rendah
6	Gondorwulan	13		Sedang
7	Jangkrikan	9		Sedang
8	Kepil	18		Tinggi
9	Kapulogo	7		Rendah
10	Kagungan	6	Rendah: 3-8	Rendah
11	Randusari	6	Sedang: 9-14	Rendah
12	Rejosari	4	Tinggi: 15-20	Rendah
13	Kalipuru	3		Rendah
14	Ngalian	3		Rendah
15	Tanjunganom	9		Sedang
16	Kaliwuluh	10		Sedang
17	Beran	13		Sedang
18	Tegalgot	6		Rendah
19	Warangan	7		Rendah
20	Ropoh	19		Tinggi
21	Pulosaren	15		Tinggi
	Total jumlah	199		

¹⁶ Tulus T. H. Tambunan, *Perekonomian...*, h. 60-61.

¹⁷ Hasil Penyebaran Kuesioner terhadap 123 Responden

Setelah dilakukan penelitian terhadap keluarga kaum urban melalui penyebaran kuesioner selanjutnya data akan dibuat kategori menurut Indeks CIBEST yang terdiri atas 4 kuadran. Dari 123 responden 11 di antaranya adalah keluarga yang terpenuhi dari segi kebutuhan spiritual dan kebutuhan materialnya sehingga termasuk dalam kategori kuadran I (SV tinggi, MV kaya/ terpenuhi). Sedangkan 112 keluarga lainnya termasuk dalam kategori kuadran II yang berarti kebutuhan spiritualnya terpenuhi akan tetapi tidak atau kurang pada kebutuhan materialnya (SV tinggi, MV miskin). Dari seluruh responden yang diteliti tidak ada yang termasuk dalam kategori kuadran III (SV rendah, MV kaya) dan kuadran IV (SV rendah, MV miskin).

Fenomena kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Kepil ini tidak lain adalah karena keberadaannya yang di bawah standar Garis Kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini BPS. Kemiskinan yang terjadi juga merupakan salah satu dampak tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian bagi penduduk yang tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan tetap.¹⁸ Bagi mereka yang memiliki lahan pertanian acap kali juga mengalami pengangguran musiman, utamanya ketika sudah melewati masa panen. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki lahan, menjadi buruh petani adalah suatu pekerjaan tidak tetap dan hanya sewaktu-waktu. Keadaan ini memaksa penduduk yang tidak memiliki lahan untuk mencari pekerjaan di luar daerahnya. Berpindahnya penduduk ini terbagi dalam transmigrasi (perpindahan dari yang padat penduduk ke daerah lain guna pemerataan) dan urbanisasi (perpindahan desa ke kota untuk mencari penghasilan dan pada saatnya akan kembali ke daerah asalnya).

Dengan menggunakan indeks CIBEST, dapat dijelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi didominasi oleh kemiskinan material. Indikator kebutuhan materi ini dipandang dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari *hifdzu nafs* dan *hifdzu 'aql* (dalam konsep kebutuhan *dharuriyah* menurut Al-Ghazali dan Al-Syathibi). Hal ini dapat dilihat dari jumlah keluarga yang termasuk dalam kuadran II yang mencapai 112 keluarga. Dari total responden sebanyak 123, tidak ada yang termasuk dalam kategori kuadran III atau IV yang berarti miskin spiritual atau kebutuhan dasar spiritualnya belum terpenuhi. Artinya secara spiritual tidak terjadi kemiskinan atau kebutuhan spiritualitas masyarakat terpenuhi.

¹⁸ Wawancara dengan Siti Rahayu, Kecamatan Kepil pada 24 Februari 2017.

Penentuan kemiskinan spiritual dan materi bersandar pada pendapat yang disampaikan Al Ghazali dan Al Syathibi bahwa kebutuhan dasar (*dharuriyah*) berpangkal dari pemeliharaan lima hal (*maqasid asy syari'ah*), yakni agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), kehormatan (*an-nasb*), dan harta (*al-mal*).¹⁹ Kemudian, dari kelima dasar itu diturunkan dalam bentuk indikator sebagai berikut:

Tabel 5
Indikator Kebutuhan Dasar Spiritual dan Material

No.	Dimensi	Indikator	Butir Pertanyaan/ Pernyataan
1.	Agama	Shalat	Melaksanakan shalat wajib 5 waktu (<i>Shubuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, Dan Isya'</i>) setiap hari dengan berjamaah secara rutin
2.	Agama	Zakat	Melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah di setiap tahunnya
3.	Agama	Puasa	Melaksanakan kewajiban puasa Bulan Ramadhan secara penuh
4.	<i>Nasab/</i> Keturunan	Lingkungan Keluarga	Suasana lingkungan keluarga mendukung untuk dilaksanakannya ibadah (tidak ada larangan atau paksaan)
5.	<i>Mal/</i> Harta	Kebijakan Pemerintah	Pemerintah/ lingkungan masyarakat mampu memberikan keamanan dan suasana kondusif untuk melaksanakan ibadah
6.	<i>Nafs</i>	Sandang	Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk beraktivitas sehari hari
7.	<i>Nafs</i>	Pangan	Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
8.	<i>Nafs</i>	Papan	Rumah dalam kondisi baik, terawat, aman dan nyaman untuk digunakan
9.	<i>Nafs</i>	Kesehatan	Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 62.

10. 'Aql Pendidikan Seluruh anak umur 7-15 tahun mengikuti program pendidikan wajib belajar 9 tahun

Di bawah ini adalah tabel distribusi frekuensi indikator kebutuhan spiritual. Data dalam tabel distribusi frekuensi ini diambil dari skor item responden untuk indikator kebutuhan spiritual yang terdiri atas 5 item pernyataan (shalat, zakat, puasa, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah).

Tabel 6
Distribusi Frekuensi Indikator Kebutuhan Spiritual²⁰

Indikator	Tidak Pernah (1)		Jarang (2)		Kadang-kadang (3)		Sering (4)		Selalu (5)	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Shalat	1	0,8	6	4,9	35	28,5	71	57,7	10	8,1
Zakat	0	0	0	0	19	15,4	45	36,6	59	48,0
Puasa	0	0	0	0	5	4,1	62	50,4	56	45,5
Keluarga	0	0	0	0	8	6,5	52	42,3	63	51,2
Pemerintah	3	2,4	1	0,8	6	4,9	57	46,3	56	45,5
Total	4	3,2	7	5,7	73	59,4	287	233,3	244	198,3
Rata-rata	0,8	0,64	1,4	1,12	14,6	11,8	57,4	46,6	48,8	39,6

Melalui tabel di atas, dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa pernyataan dalam kuesioner mengenai pelaksanaan ibadah shalat lima waktu dilakukan setiap hari dengan berjamaah secara rutin (indikator pertama) diketahui sebanyak 1 responden (0,8%) menjawab tidak pernah, 6 responden (4,9%) menjawab jarang, 35 responden (28,5%) menjawab kadang-kadang, 71 responden (57,7%) menjawab sering dan 10 responden (8,1%) menjawab selalu. Dari keseluruhan responden, jawaban sering adalah jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden. Sesungguhnya bila melihat secara personal kepada individu, di sini telah terjadi kemiskinan spiritual pada pelaksanaan shalat, akan tetapi jika ditotal secara keseluruhan dari indikator spiritual yang dijawab oleh responden maka hal itu ditiadakan.

Selanjutnya mengenai zakat sebagai indikator kedua kebutuhan spiritual sebanyak 19 responden (15,4%) menjawab kadang-kadang, 45

²⁰ Hasil Penyebaran Kuesioner terhadap Responden (Data Diolah)

responden (36,6%) menjawab sering, dan 59 responden (48%) menjawab selalu. Untuk permasalahan zakat 104 responden terpenuhi secara spiritualnya. Adapun puasa sebagai indikator ketiga, sebanyak 5 responden (4,1%) menjawab kadang-kadang, 62 responden (50,4%) menjawab sering dan 56 responden (45,5%) menjawab selalu. Dalam indikator puasa ini tampak pula bahwa 118 responden tidak dikategorikan miskin spiritual.

Sedangkan untuk lingkungan keluarga, lebih dari 51,2% (63 responden) menjawab selalu artinya suasana keluarga responden mendukung untuk dilaksanakannya ibadah, 42,3% (52 responden) menjawab sering dan 6,5% lainnya (8 responden) menjawab kadang-kadang. Mengenai kebijakan pemerintah sebagai indikator spiritual terakhir diketahui bahwasannya anggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah berbeda-beda. Responden yang menjawab tidak pernah sebanyak 3 responden (2,4%) berarti menganggap bahwa pemerintah dinilai tidak mampu memberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan ibadah atau keselamatan harta benda masyarakat. Kemudian, 1 responden (0,8%) menjawab jarang, 6 responden (4,9%) menjawab kadang-kadang, 57 responden (46,3%) menjawab sering dan 56 responden lainnya (45,5%) menjawab selalu.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa beberapa responden masuk dalam kategori miskin secara spiritual yang mana disyaratkan nilai *Spiritual Variable* (SV) = 3. Misalnya pada indikator shalat, terdapat 7 responden di bawah nilai SV. Selain itu, nampak pula pada kebijakan pemerintah yang mana sebanyak 4 responden menyatakan rasa tidak aman atau tidak ada jaminan keselamatan terhadap *mal* atau harta benda dan pelaksanaan ibadah. Akan tetapi, jika dikalkulasikan secara umum dari total jawaban responden tidak ada yang termasuk dalam kategori miskin secara spiritual. Ini membuktikan pernyataan bahwa tidak ada responden yang masuk pada kuadran III dan IV.

Jika analisis dalam kebutuhan spiritual didasarkan pada nilai SV = 3, maka untuk menganalisis apakah responden termasuk kategori miskin atau kaya pada kebutuhan materialnya didasarkan pada nilai *Material Variable* (MV) = 5.²¹ Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi untuk indikator kebutuhan material yang meliputi 5 pernyataan yakni

²¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016, h. 70.

sandang, papan, pangan, kesehatan, dan pendidikan sebagai bagian dari pada *hifdzu nafs* (pemeliharaan jasmani).

Tabel 7
Distribusi Frekuensi Variabel Indikator Kebutuhan Material²²

Kuesioner	Tidak Pernah (1)		Jarang (2)		Kadang-kadang (3)		Sering (4)		Selalu (5)	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
	Sandang	0	0	0	0	13	10,6	23	18,7	87
Pangan	0	0	1	0,8	11	8,9	14	11,4	97	78,9
Papan	3	2,4	23	18,7	19	15,4	35	28,5	43	35,0
Kesehatan	1	0,8	11	8,9	17	13,8	50	40,7	44	35,8
Pendidikan	6	4,9	5	4,1	18	14,6	41	33,3	53	43,1
Total	10	8,1	40	32,5	78	63,3	163	132,6	324	263,5
Rata-rata	2	1,62	8	6,5	15,6	12,66	32,6	26,52	64,8	52,7

Dari tabel di atas, banyak responden yang masuk dalam kategori miskin secara materi. Banyak indikator pertanyaan yang dijawab oleh responden dengan pilihan jawaban selain sering, padahal paling tidak untuk dapat dikatakan tidak miskin secara material responden harus menjawab jawaban sering sehingga nilai MV = 5.

Berdasarkan pemaparan di atas, indikator kemiskinan spiritual ataupun material sejalan dengan konsep *maqasid al-syariat* dalam ekonomi mikro menurut Al-Ghazali dan Al-Syathibi. Tujuannya adalah untuk pemeliharaan agama, jiwa raga, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan akan shalat, zakat, dan berpuasa merupakan kebutuhan dalam dimensi pemeliharaan agama (*al-din*) karena merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Secara spiritual akan dikatakan kurang, rendah atau tidak sempurna bila kewajiban shalat, zakat, puasa tidak dilakukan. Begitu pula dengan lingkungan keluarga yang termasuk dalam dimensi pemeliharaan keturunan (*al-nasb*). Lingkungan keluarga yang kondusif atau mendukung untuk terlaksananya ibadah juga menjadi syarat dalam kebutuhan spiritual. Sedangkan daapalam dimensi pemeliharaan harta diwujudkan melalui peran pemerintah dengan menjamin keamanan dalam pelaksanaan ritual ibadah masyarakatnya. Apabila negara dalam kondisi tidak aman akan dapat mengganggu ketertiban dan pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ini menjadi syarat pula untuk kebutuhan spiritual.

²² Hasil Penyebaran Kuesioner terhadap Responden (Data Diolah)

Adapun dalam kebutuhan material berhubungan dengan pemeliharaan jiwa raga (*al-nafs*) dan akal (*al-'aql*) yang diwujudkan dalam kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Namun, hal yang patut menjadi perhatian adalah karena banyak keluarga atau responden yang masih belum terpenuhi kebutuhan materialnya. Dengan melihat data bahwa terdapat 112 responden masuk dalam kategori rendah kebutuhan materinya. Tidak terpenuhinya salah satu atau sebagian dari aspek *maqasid al-syariat* dapat menjadikan seorang muslim dianggap miskin atau tidak sejahtera. Apabila kebutuhan material yang bersifat duniawi ini tidak terpenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan manusia akan binasa. Di sisi lain, dengan terpenuhinya kebutuhan materi maka pelaksanaan ibadah dapat berjalan lancar dengan tidak ada rasa kekhawatiran.

Selanjutnya, untuk mencari hubungan adakah perbedaan kemiskinan berdasarkan tingkat urbanisasinya atau tidak digunakan alat uji statistik deskriptif berupa *crosstab*. Metode ini dikenal sebagai analisis elaborasi atau teknik Lazarfeld (Sosiolog dan ahli metodologi penelitian Amerika penemu metode ini). Analisis tabulasi silang merupakan yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dengan demikian, bila sebuah penelitian menggunakan metode ini berarti bermaksud untuk mengetahui hasil bersama dari dua variabel.²³ Bila di dalam tabel searah (*one-away table*) sekedar mengklarifikasi penduduk menurut satu variabel saja, maka di dalam tabulasi silang data dapat diklarifikasi menurut dua variabel atau lebih.

Berkaitan dengan penyusunan tabulasi silang, belum ada ketentuan baku untuk meletakkan variabel bebas pada posisi baris atau kolom. Demikian halnya letak atau posisi untuk variabel tergantungnya. Hal yang terpenting adalah bagaimana cara membaca atau menginterpretasikan hasil analisis *crosstab* sehingga penjelasan hubungan variabel yang ingin dijelaskan dapat tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah hasil perhitungan *crosstab* antara kategori kuadran kemiskinan dan desa dengan tingkat/ laju urbanisasi:

²³ Alizar Isna dan Wardo, *Analisis...*, h. 89.

Tabel 8
 Hasil Output SPSS Tabulasi Silang Kuadran dan Desa
Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KUADRAN KEMISKINAN * TINGKAT URBANISASI DESA	123	100,0%	0	0,0%	123	100,0%

Tabel 9
KATEGORI KUADRAN KEMISKINAN * TINGKAT URBANISASI DESA
Crosstabulation

		TINGKAT URBANISASI DESA			Total
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
	Count	1	7	3	11
	% within KATEGORI	9,1%	63,6%	27,3%	100,0%
KATEGORI 1	% within DESA	2,6%	17,5%	6,8%	8,9%
KUADRA	% of Total	0,8%	5,7%	2,4%	8,9%
	Count	38	33	41	112
	% within KATEGORI	33,9%	29,5%	36,6%	100,0%
KEMISKI	% within DESA	97,4%	82,5%	93,2%	91,1%
NAN 2	% of Total	30,9%	26,8%	33,3%	91,1%
	Count	39	40	44	123
	% within KATEGORI	31,7%	32,5%	35,8%	100,0%
Total	% within DESA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	31,7%	32,5%	35,8%	100,0%

Output Crosstab terdiri dari 2 bagian, yaitu *Case Processing Summary* dan *KATEGORI KUADRAN KEMISKINAN * TINGKAT URBANISASI DESA Crosstabulation*. Pada output bagian pertama dijelaskan bahwa data yang berjumlah 123 semuanya valid dan tidak ada yang masuk kategori *missing*. Dengan demikian, jumlahnya sama dengan data sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni 123.

Output bagian kedua menggambarkan, dari 123 responden penelitian, 44 keluarga di antaranya (35,8%) adalah keluarga yang berada pada desa dengan tingkat urbanisasi tinggi, sementara itu 40 keluarga lainnya (32,5%) berada pada desa dengan tingkat urbanisasi

sedang, dan 39 keluarga (31,7%) berada pada desa dengan tingkat urbanisasi rendah. Tabulasi silang pada *output* SPSS bagian kedua juga menginformasikan (lihat kolom paling kanan atau kolom total) bahwa hanya 11 keluarga (8,9%) dari total responden yang termasuk dalam kategori keluarga kuadran I indeks CIBEST (kebutuhan spiritual dan materialnya terpenuhi/ sejahtera). Sementara itu, tampak pula pada kolom tersebut bahwa sebagian besar responden yakni 112 keluarga atau 91,1% merupakan keluarga yang berada pada kategori kuadran II indeks CIBEST (kebutuhan spiritual tercukupi akan tetapi tidak pada kebutuhan materialnya).

Selanjutnya dapat diketahui dari 11 keluarga (responden) yang termasuk dalam kategori kuadran I, 1 keluarga (9,1%) merupakan keluarga yang berasal dari desa dengan tingkat urbanisasi rendah, 7 keluarga (63,6%) berasal dari desa dengan tingkat urbanisasi sedang, dan 3 keluarga lainnya (27,3%) berasal dari desa dengan tingkat urbanisasi tinggi. Sedangkan dari 112 keluarga yang termasuk dalam kategori kuadran II, 38 keluarga di antaranya (33,9%) adalah berasal dari desa dengan tingkat urbanisasi rendah, 33 keluarga (29,5%) berasal dari desa dengan tingkat urbanisasi sedang, dan 41 keluarga lainnya (36,6%) berasal dari desa dengan tingkat urbanisasi tinggi. Dari tabel di atas, dapat dijelaskan pula bahwa nilai indeks CIBEST dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Welfare* (W/ Kesejahteraan) sebagai kuadran I

$$W = \frac{w}{N}, \text{ di mana}$$

W = indeks kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$

w = jumlah keluarga sejahtera (kaya secara spiritual dan materi)

N = jumlah populasi (keluarga yang diteliti/ diobservasi)

$$\text{Maka, } W = \frac{11}{123} = 0,089$$

2. *Poverty of Material* (Pm) sebagai kuadran II

$$Pm = \frac{Mp}{N}, \text{ di mana}$$

Pm = indeks kemiskinan materi; $0 \leq Pm \leq 1$

Mp = jumlah keluarga miskin secara materi namun kaya secara spiritual

N = jumlah populasi keluarga yang diteliti atau diobservasi

$$\text{Maka, } Pm = \frac{112}{123} = 0,91$$

Adapun untuk nilai *Poverty of Spiritual* (Ps) dan *Poverty Absolute* (Pa) dalam penelitian ini adalah masing-masing nol (0). Karena dari

sejumlah keluarga yang diteliti, tidak ada keluarga yang termasuk dalam kategori kuadran III dan kuadran IV. Kemudian, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan asosiasi atau perbedaan antara kategori kuadran kemiskinan dan desa dengan laju urbanisasi dapat digunakan statistik *Chi-Square Tests*. Hipotesisnya adalah:

Ho : tidak terdapat perbedaan kuadran kemiskinan antara desa dengan tingkat urbanisasi tinggi, sedang, dan rendah (Ha: $\mu \neq 0$)

Ha : terdapat perbedaan kuadran kemiskinan antara desa dengan tingkat urbanisasi tinggi, sedang, dan rendah (Ho: $\mu = 0$).

Untuk menyimpulkan apakah Ho ditolak atau diterima, dilakukan uji signifikansi di mana jika *Chi-Square* hitung \geq *Chi-Square* tabel, Ho ditolak. Dan jika *Chi-Square* hitung $<$ *Chi-Square* tabel, Ho diterima. Uji signifikansi juga dapat dilakukan berdasarkan nilai probabilitasnya, di mana jika nilai probabilitasnya $\geq \alpha$ (0,05) Ho diterima. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya $< \alpha$ (0,05) Ho ditolak. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan melihat tabel *Chi-Square Tests* berikut, dapat ditentukan apakah Ho diterima atau ditolak. Berikut tabel *Chi-Square Tests* sebagaimana dimaksud:

Tabel 10
Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5,789 ^a	2	,055
Likelihood Ratio	5,796	2	,055
N of Valid Cases	123		

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,49.

Dengan menggunakan pendekatan yang kedua (uji signifikansi melalui nilai probabilitas) untuk kasus penelitian ini terlihat pada kolom *Asymp.Sig (Asymptoti Significance)* nilainya sebesar 0,055 atau probabilitasnya di atas 0,05 (0,055 $>$ 0,05). Dengan demikian, Ho diterima pada α 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan kuadran kemiskinan antara desa dengan tingkat urbanisasi tinggi, sedang, dan rendah. Hal tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian di mana sampel diambil yakni masyarakat di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.

PENUTUP

Dengan menggunakan indeks CIBEST dapat digambarkan bahwa gambaran kemiskinan keluarga kaum urban di Kecamatan Kepil terbagi dalam dua kuadran, yaitu kuadran I (sejahtera) dan kuadran II (tingkat spiritual tinggi dan kebutuhan materi rendah) masing-masing 11 keluarga (8,9%) dan 112 keluarga (91,1%). Selain itu, dapat digambarkan pula bahwa nilai indeks CIBEST di Kecamatan Kepil pada nilai kesejahteraan (*Welfare/ W*) adalah sebesar 0,089 dan nilai *Poverty of Material* (*Pm*) adalah 0,91. Sedangkan untuk nilai *Poverty of Spiritual* (*Ps*) dan *Poverty of Absolute* (*Pa*) sama dengan nol (0) karena tidak ada keluarga (responden) yang termasuk di dalam kategori kemiskinan spiritual maupun kemiskinan absolut.

Fenomena urbanisasi yang terjadi di Kecamatan Kepil merupakan dampak dari permasalahan pada sektor ekonomi tradisional (pertanian/ perkebunan) di mana penduduk yang tidak memiliki lahan akan memilih berprofesi sebagai pedagang, wirausaha, buruh atau merantau ke daerah lain (urbanisasi). Sedangkan untuk tingkat urbanisasi desa/ kelurahan di Kecamatan Kepil terbagi dalam 3 tingkatan yaitu rendah (3-8 penduduk), sedang (9-14 penduduk) dan tinggi (15-20 penduduk). Termasuk dalam kategori rendah sebanyak 11 desa, 6 desa termasuk dalam kategori sedang dan 4 desa termasuk dalam kategori tinggi.

Tidak terdapat perbedaan antara kategori kuadran kemiskinan dan desa dengan tingkat urbanisasi tinggi, sedang, atau rendah. Hal ini dapat diketahui dari uji hipotesis yang dilakukan, yakni nilai Pearson Chi-Square (0,318) lebih besar dari 0,05. Atau *Asymp.Sig (Asymptoti Significance)* nilainya sebesar 0,055 yang mana probabilitasnya di atas 0,05 (secara matematis ditulis $0,055 > 0,05$).

Dari hasil penelitian ini, maka disarankan bagi pemerintah setempat untuk menjadikan keluarga yang berada pada kuadran II sebagai target utama program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, desain program untuk kuadran II lebih difokuskan pada penyediaan akses keuangan dan bantuan teknis seperti bantuan modal usaha. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat di Kecamatan Kepil yang tidak ada perbedaan antara keluarga pada desa dengan tingkat urbanisasi tinggi, sedang atau rendah dengan kemiskinan. Maka, pengentasan kemiskinan tidak selalu harus diwujudkan dengan urbanisasi. Dengan program padat karya atau bantuan permodalan untuk usaha sekiranya dapat membantu masyarakat untuk berusaha dari pada mencari pekerjaan baru di kota.

Daftar Rujukan

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2017*. Wonosobo: BPS. 2017.
- Hasan, Mohammad. "DAKWAH DAN PROBLEMA KEMISKINAN." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (28 November 2014): 15. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.363>.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Isna, Alizar dan Wardo. *Analisis Data Kuantitatif Dengan IBM SPSS Statistics 20: Panduan Praktis untuk Penelitian Sosial Dilengkapi dengan Analisis Regresi Nominal dan Ordinal*. Purwokerto: STAIN Press. 2013.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/ MEN/ IV/ 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- Putong, Iskandar. *Economics: Pengantar Mikro Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Tambunan, Tulus T. H. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Thalib, Hamidy, M. Irwan, dan Ihsan Ro'is. "Peranan Amil sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (20 Desember 2016): 290-206. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1079>.
- Yaqin, Ainol. "OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN PROBLEMA KEMISKINAN." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, no. 2 (31 Desember 2015): 220-41. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.849>.